

# LAPORAN KEUANGAN

Direktorat Jenderal Anggaran

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022  
(Audited)



Gedung Sutikno Slamet Lantai 11  
Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Anggaran adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Entitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tingkat Eselon I mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK/05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akrual dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Anggaran. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2023  
Direktur Jenderal Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik  
Isa Rachmatarwata



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 2435  
TELEPON (021) 3866117; FAKSIMILI (021) 3505118, SITUS [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2023  
Direktur Jenderal Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik  
Isa Rachmatarwata



## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran TA 2022 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp208.802.437,00. Estimasi Pendapatan LRA pada DIPA Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.608.000,00.

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp74.125.972.129,00 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp75.135.501.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31-Dec-22		31-Dec-21	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>2.608.000</b>	<b>208.802.437</b>	-	<b>1.611.480.376</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.608.000</b>	<b>208.802.437</b>	-	<b>1.611.480.376</b>
Belanja Pegawai	35.518.067.000	35.506.530.838	63.746.486.000	63.604.193.812
Belanja Barang	37.202.644.000	36.208.554.910	36.606.330.000	36.137.115.127
Belanja Modal	2.414.790.000	2.410.886.381	11.585.444.000	11.584.972.954
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>75.135.501.000</b>	<b>74.125.972.129</b>	<b>111.938.260.000</b>	<b>111.326.281.893</b>

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp53.799.125.577,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp685.399.029,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp51.406.462.180,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.707.264.368,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp53.799.125.577,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31-Dec-22	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)
<b>Aset</b>	<b>53.799.125.577</b>	<b>62.060.048.387</b>	<b>(8.260.922.810)</b>
Aset Lancar	685.399.029	439.339.474	246.059.555
Aset Tetap	51.406.462.180	58.240.514.453	(6.834.052.273)
Aset Lainnya	1.707.264.368	3.380.194.460	(1.672.930.092)
<b>Kewajiban</b>	<b>-</b>	<b>6.058.988</b>	<b>(6.058.988)</b>
Kewajiban Jangka Pendek	0	6.058.988	(6.058.988)
<b>Ekuitas</b>	<b>53.799.125.577</b>	<b>62.053.989.399</b>	<b>(8.254.863.822)</b>

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.528.726,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp83.600.563.374,00. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp83.592.034.648,00. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp168.581.358,00 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp83.423.453.290,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Rp	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan Operasional	8.528.726	48.707.382	(40.178.656)	(82,49)
PNBP	8.528.726	48.707.382	(40.178.656)	(82,49)
Beban Operasional	83.600.563.374	120.534.012.048	(36.933.448.674)	(30,64)
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(83.592.034.648)</b>	<b>(120.485.304.666)</b>	<b>36.893.270.018</b>	<b>(30,62)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			-	-
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(84.123.991)	1.557.817.683	(1.641.941.674)	(105,40)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	252.705.349	4.955.311	247.750.038	4.999,69
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>168.581.358</b>	<b>1.562.772.994</b>	<b>(1.394.191.636)</b>	<b>(89,21)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	-	-	-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) LO</b>	<b>(83.423.453.290)</b>	<b>(118.922.531.672)</b>	<b>35.499.078.382</b>	<b>(29,85)</b>

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp62.053.989.399,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp83.423.453.290,00 kemudian ditambah/ (dikurangi) dengan transaksi antar entitas sebesar Rp75.168.589.468,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 53.799.125.577,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut:

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Des 2022	31 Des 2021	Rp	%
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>62.053.989.399</b>	<b>64.159.823.873</b>	<b>(2.105.834.474)</b>	<b>(3,28)</b>
Surplus (Defisit) LO	(83.423.453.290)	(118.922.531.672)	35.499.078.382	(29,85)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	-	(177.825)	-	-
Transaksi Antar Entitas	75.168.589.468	116.816.875.023	(41.648.285.555)	(35,65)
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>(8.254.863.822)</b>	<b>(2.105.834.474)</b>	<b>(6.149.029.348)</b>	<b>292,00</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>53.799.125.577</b>	<b>62.053.989.399</b>	<b>(8.254.863.822)</b>	<b>(13,30)</b>

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

# I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN ANGGARAN 03  
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 630931

Tgl Data : 01/05/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 01/05/23 12:52 PM  
Halaman : 1  
lap\_lra\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.608.000	208.802.437	208.194.437	8006	0	1.611.480.376	(1.611.480.376)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>2.608.000</b>	<b>208.802.437</b>	<b>208.194.437</b>	<b>8006</b>	<b>0</b>	<b>1.611.480.376</b>	<b>(1.611.480.376)</b>	<b>8006</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	35.518.067.000	35.506.530.838	11.536.162	100	63.746.486.000	63.604.193.812	142.292.188	100
	BELANJA BARANG	37.202.644.000	36.208.554.910	994.089.090	97	36.606.330.000	36.137.115.127	469.214.873	99
	BELANJA MODAL	2.414.790.000	2.410.886.381	3.903.619	100	11.585.444.000	11.584.972.954	471.046	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN ANGGARAN 03  
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 630931

Tgl Data : 01/05/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 01/05/23 12:52 PM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>75,135,501,000</b>	<b>74,125,972,129</b>	<b>1,009,528,871</b>	<b>99</b>	<b>111,938,260,000</b>	<b>111,326,281,893</b>	<b>611,978,107</b>	<b>99</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0



Ditandatangani secara elektronik  
Isa Rachmatarwata



## II. NERACA

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN ANGGARAN  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 630931 ) DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Tgl Data : 01/05/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 01/05/23 12:53 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	248,113,641	6,537,575	241,576,066	3,695.19
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,240,568)	(32,688)	(1,207,880)	3,695.18
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>246,873,073</b>	<b>6,504,887</b>	<b>240,368,186</b>	<b>3,695.19</b>
Persediaan	438,525,956	432,834,587	5,691,369	1.31
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>685,399,029</b>	<b>439,339,474</b>	<b>246,059,555</b>	<b>56.01</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	19,900,206,000	19,900,206,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	99,927,654,075	97,743,870,096	2,183,783,979	2.23
Gedung dan Bangunan	7,548,135,276	7,328,831,899	219,303,377	2.99
Aset Tetap Lainnya	617,669,237	687,693,228	(70,023,991)	(10.18)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,475,881,962	2,861,262,762	(385,380,800)	(13.47)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(79,063,084,370)	(70,281,349,532)	(8,781,734,838)	12.50
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>51,406,462,180</b>	<b>58,240,514,453</b>	<b>(6,834,052,273)</b>	<b>(11.73)</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	2,661,026,866	2,437,357,653	223,669,213	9.18
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,661,026,866)	(2,437,357,653)	(223,669,213)	9.18
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	10,151,118,218	12,562,647,951	(2,411,529,733)	(19.20)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(8,443,853,850)	(9,182,453,491)	738,599,641	(8.04)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1,707,264,368</b>	<b>3,380,194,460</b>	<b>(1,672,930,092)</b>	<b>(49.49)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>53,799,125,577</b>	<b>62,060,048,387</b>	<b>(8,260,922,810)</b>	<b>(13.31)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	6,058,988	(6,058,988)	(100.00)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0</b>	<b>6,058,988</b>	<b>(6,058,988)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>6,058,988</b>	<b>(6,058,988)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	53,799,125,577	62,053,989,399	(8,254,863,822)	(13.30)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>53,799,125,577</b>	<b>62,053,989,399</b>	<b>(8,254,863,822)</b>	<b>(13.30)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>53,799,125,577</b>	<b>62,053,989,399</b>	<b>(8,254,863,822)</b>	<b>(13.30)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>53,799,125,577</b>	<b>62,060,048,387</b>	<b>(8,260,922,810)</b>	<b>(13.31)</b>



Ditandatangani secara elektronik  
Isa Rachmatarwata

### III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN ANGGARAN  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 630931 ) DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Tgl Data : 01/05/23 6:00 AM  
Tgl Cetak : 01/05/23 12:52 PM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,528,726	48,707,382	(40,178,656)	(82.49)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	8,528,726	48,707,382	(40,178,656)	(82.49)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	8,528,726	48,707,382	(40,178,656)	(82.49)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	35,506,530,838	63,604,193,812	(28,097,662,974)	(44.176)
Beban Persediaan	281,818,833	673,286,783	(391,467,950)	(58.143)
Beban Barang dan Jasa	19,820,690,248	31,257,862,142	(11,437,171,894)	(36.59)
Beban Pemeliharaan	4,586,874,959	3,333,474,651	1,253,400,308	37.6
Beban Perjalanan Dinas	11,494,687,672	9,052,140,980	2,442,546,692	26.983
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN ANGGARAN  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 630931 ) DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Tgl Data : 01/05/23 6:00 AM  
 Tgl Cetak : 01/05/23 12:52 PM  
 Halaman : 2  
 lap\_lo\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	11,685,083,731	12,613,020,992	(927,937,261)	(7.357)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	224,877,093	32,688	224,844,405	687,849.991
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>83,600,563,374</b>	<b>120,534,012,048</b>	<b>(36,933,448,674)</b>	<b>(30.642)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(83,592,034,648)</b>	<b>(120,485,304,666)</b>	<b>36,893,270,018</b>	<b>(30.621)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(84,123,991)	1,557,817,683	(1,641,941,674)	(105.4)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	14,700,000	1,557,817,683	(1,543,117,683)	(99.056)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	98,823,991	0	98,823,991	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	252,705,349	4,955,311	247,750,038	4,999.687
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	276,205,075	109,434,419	166,770,656	152.393
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	23,499,726	104,479,108	(80,979,382)	(77.508)
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>168,581,368</b>	<b>1,562,772,994</b>	<b>(1,394,191,636)</b>	<b>(89.213)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(83,423,453,290)</b>	<b>(118,922,531,672)</b>	<b>35,499,078,382</b>	<b>(29.851)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(83,423,453,290)</b>	<b>(118,922,531,672)</b>	<b>35,499,078,382</b>	<b>(29.851)</b>



Ditandatangani secara elektronik  
 Isa Rachmatarwata



## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN ANGGARAN  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
 SATUAN KERJA : ( 630931 ) DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Tgl Data : 01/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 01/05/23 12:52 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	62,053,989,399	64,159,823,873	(2,105,834,474)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(83,423,453,290)	(118,922,531,672)	35,499,078,382	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(177,825)	177,825	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(177,825)	177,825	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	75,168,589,468	116,816,875,023	(41,648,285,555)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8,254,863,822)	(2,105,834,474)	(6,149,029,348)	-
EKUITAS AKHIR	53,799,125,577	62,053,989,399	(8,254,863,822)	-



Ditandatangani secara elektronik  
**Isa Rachmatarwata**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Dasar Hukum

#### A. PENJELASAN UMUM

##### A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Ulang Aset Tetap;
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM. 06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

35. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Struktural dan Kuasa Pengguna barang di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka Pengelolaan barang Milik Negara;
37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KM.1/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan;
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
43. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
44. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Anggaran**

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi di bawah Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran adalah unit eselon I DJA yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan.

Sentra dari peran Direktorat Jenderal Anggaran tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada keseimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dan efisiensi belanja negara, serta dengan tetap mengupayakan penurunan defisit anggaran.

**Berkedudukan di Gedung Sutikno Slamet, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Anggaran berkomitmen pada visi:** “Menjadi pengelola APBN yang profesional dan terpercaya untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.” Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Menerapkan pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan PNPB yang optimal melalui tata kelola, pengawasan dan pelayanan yang efektif dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan kualitas sistem, proses, dan sinergi penganggaran untuk mewujudkan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- 4) Menerapkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Visi dan misi tersebut menjadi arah dan pedoman Direktorat Jenderal Anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Direktorat Jenderal Anggaran memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Direktorat Jenderal Anggaran juga memiliki 7 (tujuh) fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran

- pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  - 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
  - 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran, dan
  - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

### A.2.1. Nilai Kinerja Organisasi

Sesuai KMK 300 Tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi DJA Tahun 2022 sebesar 110,534. Dari 25 total IKU, 24 IKU mencapai target (status hijau), sedangkan 1 IKU status kuning, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

*Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran TA 2022*

Kode IKU	IKU	Target					Capaian					Indeks Y
		Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)</b>												
1	Perencanaan APBN yang berkualitas dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal											
1a-CP	Indeks kualitas belanja negara	5	30	50	86	86	17,8	42,45	58,31	92,00	92,00	106,98
1b-CP	Persentase realisasi PNBPN	15%	40%	60%	100%	100%	29,5%	85,3%	89,6	122,2%	122,2%	120
1c-N	Nilai Kinerja Anggaran BUN			32,56	85	85	9,1	30,05	54,65	95,95	95,95	112,88
1d-N	Akurasi proyeksi realisasi APBN	95%	95%	95%	95%	95%	97,10 %	99,67%	99,55%	99,36 %	98,92%	104,13

Kode IKU	IKU	Target					Capaian					Indeks Y
		Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)</b>												
2	Kebijakan fiskal yang berkualitas											
2a-CP	Indeks efektifitas kebijakan fiskal				85	85				99,1	99,1	116,58
2b-CP	Persentase communique G-20 usulan Indonesia yang disepakati	70%		70%	70%	70%	90,6%		93,02%	98,54%	94,05%	120
3	Pengelolaan PNBPN yang optimal											
3a-N	Persentase kepatuhan atas peraturan PNBPN		30%		90%	90%	30,78%	41%	77,4	101	101	112,22
4	Belanja negara yang berkualitas											
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara	100	100	100	100	100	120	120	120	116,66	116,66	116,66
4b-N	Indeks implementasi penganggaran berbasis kinerja				88	88				93,11	93,11	105,8
4c-N	Nilai kinerja anggaran PPA BUN	4,02	15,92	24,56	82	82	8,59	27,44	57,99	95,95	95,95	117,01
5	Dukungan program DJA yang efektif, efisien, dan akuntabel											
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan				4,4	4,4				4,34	4,34	98,63
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)</b>												
6	Formulasi kebijakan fiskal yang kredibel											
6a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas				100	100	72,62	87,50	97,50	104,06	103,75	103,75
6b-N	Persentase persetujuan dan ketepatan waktu dalam rangka penyusunan rekomendasi harmonisasi peraturan dan rekomendasi kebijakan di bidang penganggaran	92%	92%	92%	92%	92%	101,80%	98,07%	100,24%	101,22%	100,47%	109,06
7	Efisiensi proses bisnis dan pengawasan PNBPN yang efektif dan kolaboratif											
7a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	20%	40%	60%	84%	84%	28,03%	60,56%	69	96,87%	94,21%	112,15
7b-CP	Tingkat efektifitas pengawasan penerimaan negara	13%	40%	64%	92,50%	92,5%	17,05%	53,29%	69,15%	97,21%	97,21%	105,09

Kode IKU	IKU	Target					Capaian					Indeks Y
		Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	
8	Sinergi perencanaan dan penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah											
8a-CP	Tingkat harmonisasi Perencanaan Penganggaran K/L, Non KL, dan Transfer ke Daerah	37,5	52,5	90	100	100	35	58,75	90	100	100	120 Capaian Maksimal
8a1-CP	Persentase penyempurnaan regulasi kebijakan/probis harmonisasi anggaran pusat dan daerah	37,50 %	75%	100%		100%	35%	87,5%	100		100%	100
8a2-CP	Tingkat Sinergi Perencanaan Penganggaran K/L, non-K/L, dan transfer ke daerah		30	80	100	100		30	80	100	100	100
8b-CP	Persentase Integrasi aplikasi perencanaan penganggaran SAKTI dan KRISNA-DAK	15%	40%	75%	100%	100%	15%	40%	75%	100%	100%	120 Capaian Maksimal
9	Pengendalian kualitas pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan											
9a-CP	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		30%		89,5%	89,5%		56,50%	56,5	93,62%	93,62%	104,60
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE (25%)</b>												
10	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif											
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100	100	100	100	100	146,8	100,95	109,67	118,89	119,08	119,08
10b-CP	Persentase penyelesaian program IS Kemenkeu	23%	46%	69%	92%	92%	26,37%	50,11 %	76,76 %	99,22 %	99,22%	107,85
10c-CP	Tingkat implementasi Kemenkeu Satu		20		91,75	91,75		40		93,54	105,54	115,02
10c1-CP	Tingkat implementasi learning organization				83,5	83,50				91,07	91,07	109,06
10c2-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu		20		100	100		40		120	120	120

Kode IKU	IKU	Target					Capaian					
		Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Indeks Y
10d-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan		3,55		3,55	3,55		3,65		3,82	3,73	105,07
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal											
11a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan keu BA 015	100	100	100	100	100	105	138,64	103,79	224,11	109,54	109,54
11a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keu BA 015	68	90,4	90,4	90,4	90,4	110	103	95	95	95	105,09
11a2-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJA	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	100%	98,23%	97,89%	98,44%	98,44%	103,08
11a3-CP	Persentase implementasi back office terintegrasi		40%		100%	100%		60%	70%	104,16%	110%	110
11a4-CP	Tingkat efisiensi belanja birokrasi		30		80	80		56,33	62,47	597,62	597,62	120
12	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif											
12a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Sistem TIK	100	100	100	100	100	125	139,95	116,33	100	109,56	109,56
12a1-CP	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK	10%	30%	60%	90%	90%	12,5%	47,97%	69,80%	100%	100%	111,11
12a2-CP	Tingkat implementasi digital enabling ecosystem Kemenkeu		100		100	100		120		108	108	108
13	Penguatan pengawasan yang efektif											
13a-CP	Indeks integritas organisasi				95,66	95,66				103,82	103,826	108,53
13a1-CP	Indeks integritas				91,41	91,41				92,66	92,66	101,36
13a2-CP	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK				100	100				114,98	114,98	114,98

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan TA 2022 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Dalam penerapannya SAI didukung dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mulai digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sejak Tahun 2018. SAKTI juga digunakan untuk menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran TA 2022 *Audited* ini merupakan laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran yang diberikan yang pada nantinya akan dilakukan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan.

### **A.4. Basis Akuntansi**

Direktorat Jenderal Anggaran menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **A.5. Dasar Pengukuran**

Dasar pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan

nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### *Kebijakan Akuntansi*

### **A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konversi-konversi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah
- Pendapatan-LRA diakui saat kas diterima pada KUN
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
  - b. Pendapatan Penjualan Lainnya
  - c. Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan
  - d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
  - e. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya

#### Aset Lancar

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

### *Penggolongan Kualitas Piutang*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Akan dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya..
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

- d. Piutang Jangka Panjang**
- Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

- e. Aset Lainnya**
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud dan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang:
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang masih harus dibayar, Pendapatan diterima dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Utang Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Anggaran telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak dua belas kali dari DIPA awal, dari semula Rp101.902.766.000,00 menjadi Rp75.135.501.000,00.

Perubahan pagu DJA TA 2022 berdasarkan Revisi DIPA terdiri dari pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp27.430.266.000,00 dan penambahan pagu belanja barang sebesar Rp1.096.214.000,00. Penambahan pagu belanja barang terdiri dari: Rp663.001.000,00 bersumber dari hibah luar negeri, dan Rp443.213.000,00 yang merupakan pergeseran dari pagu belanja modal ke belanja barang.

Revisi DIPA yang pertama dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022, dimana terdapat penambahan pagu anggaran belanja DJA dari yang semula Rp101.902.766.000,00 menjadi Rp102.230.921.000,00. Penambahan tersebut merupakan penambahan belanja DJA TA 2022 yang bersumber dari hibah luar negeri berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-60/SJ/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Revisi Anggaran Ditjen Anggaran TA 2022.

Selanjutnya, pada Revisi DIPA keenam terdapat pengurangan pagu anggaran belanja sebesar Rp27.430.266.000,00 menjadi Rp74.800.655.000,00. Pengurangan pagu tersebut dilaksanakan untuk mendukung impementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-105/SJ/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Sentralisasi Gaji Tahap II lingkup Kementerian Keuangan TA 2022.

Selanjutnya, pada Revisi DIPA kedelapan terdapat penambahan pagu anggaran belanja menjadi Rp75.135.501.000,00. Penambahan pagu sebesar Rp334.846.000,00 merupakan penambahan anggaran belanja barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.

Uraian	2022	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	2.608.000	2.608.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.608.000</b>	<b>2.608.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	62.948.333.000	35.518.067.000
Belanja Barang	35.927.855.000	37.202.644.000
Belanja Modal	3.026.578.000	2.414.790.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>101.902.766.000</b>	<b>75.135.501.000</b>

Realisasi  
Pendapatan Rp  
208.802.437

### B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp208.802.437,00. Pendapatan Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Realisasi Pendapatan*

Uraian	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.700.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.000.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.514.476
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	3.050.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	636
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	35.573.075
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	150.000.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	964.250
<b>Total</b>	<b>208.802.437</b>

Penjelasan terhadap tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.700.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari lelang Barang Milik Negara berupa 1 paket barang inventaris Peralatan dan Mesin berupa Printer yang dilelang pada 25 November 2022 dengan Risalah Lelang Nomor RL-925/26/2022 dan NTPN 285536U8ECHDB0HB
- b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp12.000.000,00 merupakan pendapatan yang berasal dari lelang

Barang Milik Negara berupa 1 paket bongkaran yang dilelang pada tanggal 16 Februari 2022 dengan Risalah Lelang nomor RL-94/26/2022 dan NTPN A79DF8N3E0OU9PP1.

- c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp4.514.476,00 berasal dari pendapatan sewa rumah Dinas Pegawai berupa apartemen yang berlokasi di Puri Casablanca.
- d. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp3.050.000,00 berasal dari penghapusan barang non arsip berupa cetakan berlebih, buku, map bekas, dus, stopmap, dan cover DIPA tahun-tahun yang lalu dengan nomor NTPN BD11755DEMHPLQ8P, 7FB9555DEMR418SN, B92517QLU6U4TA10, 065083CIF28KD62N
- e. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp636,00 berasal dari pengembalian belanja berupa pembulatan gaji pokok PNS.
- f. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp35.573.075,00 berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Soetikno Slamet TA 2021 sebesar Rp29.035.500,00 dan Pengembalian kelebihan pembayaran Termin XII Sewa Mesin *Fotocopy* sebesar Rp6.537.575,00.
- g. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp150.000.000,00 berasal dari pengembalian kelebihan pembayaran atas Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Teknis dan *Assessment* serta Pembaharuan *As built Drawing* Gedung Soetikno Slamet TA 2021 Kontrak No. PRJ-05.06/PBJ-DJA/2021 tanggal 7 Mei 2021.
- h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp964.250,00 yang terdiri dari:
  - i. Rp335.000,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan *Technical Assistance On Monev Of Performance Implementation Of PPP AP Termin II* ke rekanan dengan berita acara serah terima nomor BA-08.03/PBJ-DJA/2022 dan SP2D nomor 221401302000744;
  - ii. Rp263.940,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pencetakan Cover DIPA TA 2023 dengan berita acara

serah terima nomor BA-12.02/AG.4/PPBJ.5/2022 dan SP2D nomor 220191302045199;

- iii. Rp365.310,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pencetakan SP DIPA TA 2023 dengan berita acara serah terima nomor BA-12.01/AG.4/PPBJ.5/2022 dan SP2D nomor 220191301052230.

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.402.677.939,00 atau (87,04%) dari realisasi Tahun Anggaran 2021 Rp1.611.480.376,00. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak adanya pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat di TA 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dengan Per 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	naik/turun	% (naik/turun)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	3.050.000	3.500.000	(450.000)	(12,86)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.700.000	1.557.817.683	(1.555.117.683)	(99,83)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.000.000	-	12.000.000	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Tanah, dan Bangunan	4.514.476	2.945.812	1.568.664	53,25
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	964.250	42.261.570	(41.297.320)	(97,72)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	636	-	636	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	35.573.075	4.955.311	30.617.764	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	150.000.000	-	150.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>208.802.437</b>	<b>1.611.480.376</b>	<b>(1.402.677.939)</b>	<b>(87,04)</b>

*Realisasi Belanja  
Rp74.125.972.129*

## **B.2. Belanja**

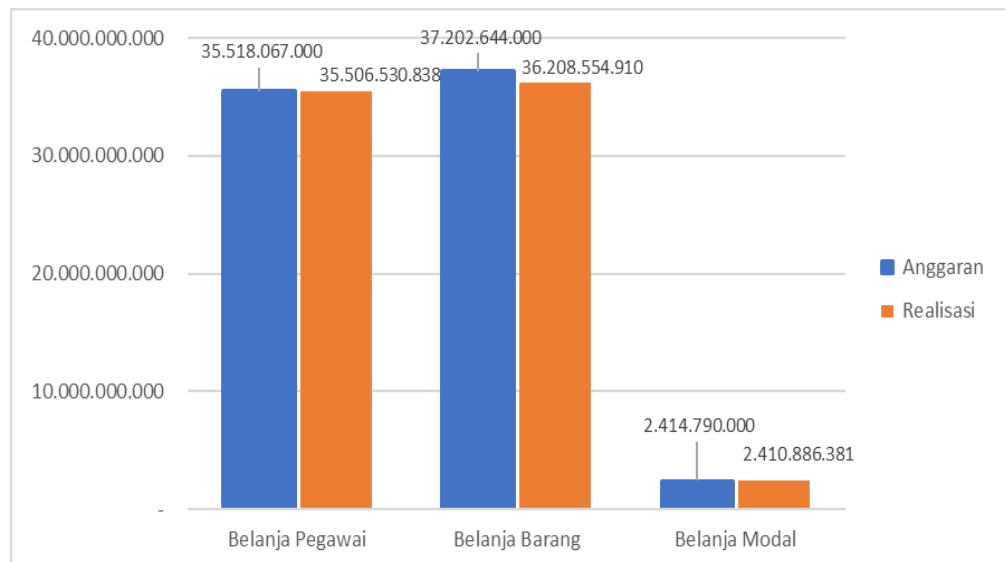
Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Anggaran pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp74.125.972.129,00 atau sebesar 98,66 persen dari anggaran senilai Rp75.135.501.000,00. Nilai realisasi belanja tersebut telah

berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta II. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2022 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022 per Jenis Belanja*

Uraian	Per 31 Desember 2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	35.518.067.000	35.507.800.904	99,97
Belanja Barang	37.202.644.000	36.387.264.936	97,81
Belanja Modal	2.414.790.000	2.410.886.381	99,84
Jumlah Kotor	75.135.501.000	74.305.952.221	98,90
Pengembalian Belanja	-	179.980.092	
<b>Jumlah</b>	<b>75.135.501.000</b>	<b>74.125.972.129</b>	<b>98,66</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022 dengan Per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022 dengan Per 31 Desember 2021*

Jenis Belanja	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	naik/turun	% (naik/turun)
Belanja Pegawai	35.506.530.838	63.604.193.812	(28.097.662.974)	(44,18)
Belanja Barang	36.208.554.910	36.137.115.127	71.439.783	0,20
Belanja Modal	2.410.886.381	11.584.972.954	(9.174.086.573)	(79)
<b>Jumlah</b>	<b>74.125.972.129</b>	<b>111.326.281.893</b>	<b>(37.200.309.764)</b>	<b>(33,42)</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp35.506.530.838*

### **B.2.1 Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yang Dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp35.506.530.838,00 dan Rp63.604.193.812,00.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dengan Per 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/turun	% (naik/turun)
	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	35.029.911.904	63.110.647.361	(28.080.735.457)	(44,49)
Belanja Lembur	477.889.000	542.348.000	(64.459.000)	(11,89)
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>35.507.800.904</b>	<b>63.652.995.361</b>	<b>(28.145.194.457)</b>	<b>(44,22)</b>
Pengembalian Belanja	1.270.066	48.801.549	(47.531.483)	(97,40)
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>35.506.530.838</b>	<b>63.604.193.812</b>	<b>(28.097.662.974)</b>	<b>(44,18)</b>

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode 31 Desember 2021 dikarenakan implementasi sentralisasi pembayaran gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh unit Sekretariat Jenderal berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-105/SJ/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Sentralisasi Gaji Tahap II lingkup Kementerian Keuangan TA 2022.

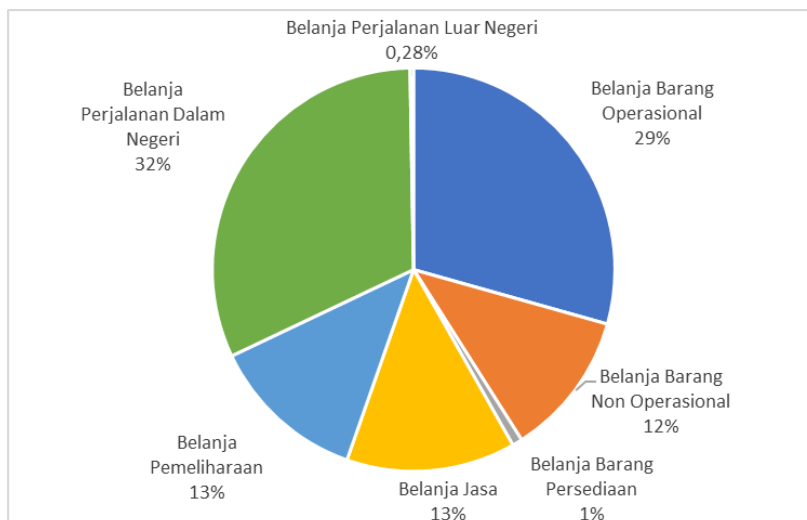
## B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Direktorat Jenderal Anggaran pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.208.554.910,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp469.214.873,00 atau 0,2% dibandingkan per 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri yang mulai dilaksanakan kembali seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berangsur menurun.

### *Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/turun	% (naik/turun)
	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021		
Belanja Barang Operasional	10.680.602.038	12.271.848.061	(1.591.246.023)	(12,97)
Belanja Barang Non Operasional	4.232.237.021	5.688.586.571	(1.456.349.550)	(25,60)
Belanja Barang Persediaan	295.018.527	544.946.970	(249.928.443)	(45,86)
Belanja Jasa	4.941.925.518	5.312.189.018	(370.263.500)	(6,97)
Belanja Pemeliharaan	4.579.366.634	3.289.890.627	1.289.476.007	39,20
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11.556.032.498	9.166.693.993	2.389.338.505	26,07
Belanja Perjalanan Luar Negeri	102.082.700	-	102.082.700	100
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>36.387.264.936</b>	<b>36.274.155.240</b>	<b>113.109.696</b>	<b>0,31</b>
Pengembalian Belanja	178.710.026	137.040.113	41.669.913	30,41
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>36.208.554.910</b>	<b>36.137.115.127</b>	<b>71.439.783</b>	<b>0,20</b>

Komposisi Belanja Barang TA 2022 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



### B.2.3 Belanja Modal

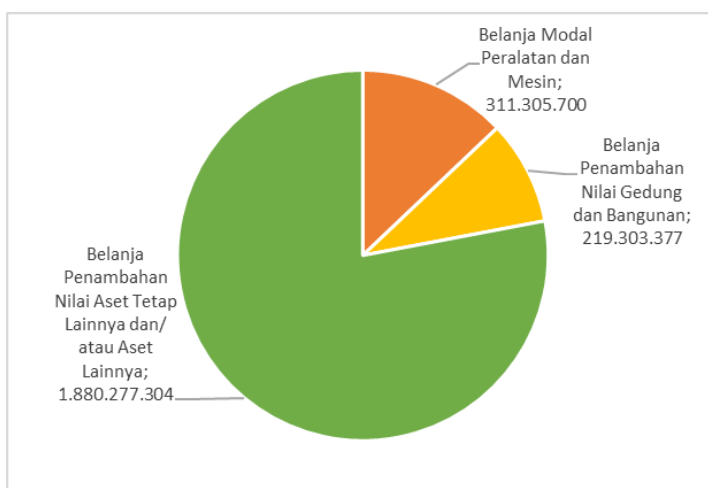
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.410.886.381,00 dan Rp11.584.972.954,00. Penurunan belanja modal sebesar Rp7.219.250.774,00 atau (91,6%) tersebut sebagian besar disebabkan tidak adanya pembelian kendaraan operasional maupun aset tetap lainnya yang dilaksanakan pada TA 2022.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/turun	% (naik/turun)
	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	311.305.700	7.401.372.927	(7.090.067.227)	(95,79)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	219.303.377	247.024.187	(27.720.810)	100,00
Belanja Modal Lainnya	-	3.155.962.262	(3.155.962.262)	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya	1.880.277.304	780.613.578	1.099.663.726	140,87
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>2.410.886.381</b>	<b>11.584.972.954</b>	<b>(9.174.086.573)</b>	<b>(79,19)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>2.410.886.381</b>	<b>11.584.972.954</b>	<b>(9.174.086.573)</b>	<b>(79,19)</b>

Komposisi Belanja Modal TA 2022 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



#### B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 sebesar Rp311.305.700,00 terdiri dari:

- a. Alat kantor berupa pengadaan sarana dan prasarana perkantoran berupa kasur kebutuhan Direktur Jenderal Anggaran, pengadaan *Neon Box*;
- b. Alat Rumah Tangga berupa pengadaan lambang Garuda Kuningan DJA, pengadaan *Head Unit* kendaraan dinas jabatan, serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam rangka Penanganan COVID 19 berupa pengadaan *Air Purifier*;
- c. Alat Studio berupa pengadaan peralatan pendukung ruang multimedia dan publikasi DJA;
- d. Peralatan Komputer berupa pengadaan *card reader* kartu pegawai dan *Switch PoE 18 Port*.

Sementara itu, perbandingan realisasi yang berkaitan dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp311.305.700,00 dan Rp7.401.372.927,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik/turun	% (naik/turun)
	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021		
Alat Angkutan Darat Bermotor (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	-	3.226.300.000	(3.226.300.000)	(100,00)
Alat Kantor	5.994.000	1.477.998.955	(1.472.004.955)	(99,59)
Alat Rumah Tangga	234.727.700	874.644.048	(639.916.348)	(73,16)
Alat Studio	59.070.000	50.651.000	8.419.000	16,62
Alat Komunikasi	-	92.466.000	(92.466.000)	(100,00)
Alat Kedokteran	-	233.524.500	(233.524.500)	(100,00)
Komputer Unit	-	1.349.738.500	(1.349.738.500)	(100,00)
Peralatan Komputer	11.514.000	96.049.924	(84.535.924)	(88,01)
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>311.305.700</b>	<b>7.401.372.927</b>	<b>(7.090.067.227)</b>	<b>(95,79)</b>

*Belanja Modal  
Penambahan  
Nilai Gedung dan  
Bangunan  
Rp219.303.377*

**B.2.3.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp219.303.377,00, sementara per 31 Desember 2021 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan. Realisasi belanja per 31 Desember 2022 merupakan pembayaran:

- a. Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Renovasi Rumah Dinas Eselon I sebesar Rp30.635.000,00;
- b. Pembayaran pengadaan pekerjaan konstruksi Renovasi Rumah Dinas Eselon I sebesar Rp170.697.127,00;
- c. Pembayaran pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Renovasi Rumah Dinas Eselon I sebesar Rp17.971.250,00.

*Belanja  
Penambahan  
Nilai aset Tetap  
Lainnya dan/atau  
Aset Lainnya  
Rp1.880.277.304*

### **B.2.3.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya**

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.880.277.304,00, yang terdiri dari:

- a. pembayaran termin I, II, dan Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Penataan dan Optimalisasi Ruang Kerja Lantai 12 dan Lantai 15 dalam rangka implementasi ABW TA 2022 sebesar Rp163.669.100,00
- b. pembayaran termin I, II, dan III Pengadaan Renovasi Penataan dan Optimalisasi Ruang Kerja Lantai 12 dan Lantai 15 dalam rangka implementasi ABW TA 2022 sebesar Rp1.643.778.754,00
- c. pembayaran tahap 1 termin I, II, III dan tahap 2 termin I Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Penataan dan Optimalisasi Ruang Kerja Lantai 13 dan Lantai 15 dalam rangka implementasi ABW TA 2022 sebesar Rp73.143.450,00

### **B.3. Catatan Penting Lainnya**

#### **B.3.1. Penerimaan Hibah Luar Negeri**

Direktorat Jenderal Anggaran menerima hibah Proyek Public Finance Management Multi Donor Trust Fund Phase III yang dibentuk oleh para negara donor, yaitu Uni Eropa, Swiss dan Kanada bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi. PFM MDTF dikelola oleh Bank Dunia sebagai Trust Fund Administrator dan Manager.

Realisasi netto hibah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.043.452.396,00 atau sebesar 87,21% dari pagu sebesar Rp2.343.148.000,00.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran berasal dari sisa UP/TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca. Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar dan Rp0,00 dan Rp0,00.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp0*

### C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/ TUP, kas lainnya, dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan

*Piutang Bukan  
Pajak  
Rp248.113.641*

### C.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp248.113.641,00 dan Rp6.537.575,00. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- a. Sebesar Rp235.380.800,00 merupakan kelebihan pembayaran sehubungan dengan hasil audit BPK RI atas Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Teknis dan Asessment serta Pembaharuan As Built Drawing Gedung Sutikno Slamet TA 2021 kontrak No. PRJ-05.06/PBJ-DJA/2021 tanggal 7 Mei 2021 sebesar Rp385.380.800,00 yang disetorkan dengan skema cicilan, sampai dengan 31 Desember 2022 telah disetorkan sebesar Rp150.000.000,00.
- b. Sebesar Rp12.732.841,00 merupakan piutang yang timbul akibat adanya selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan Realisasi Pembayaran Termin X Sewa Mesin Photocopy kebutuhan Direktorat Jenderal Anggaran pada BAST Nomor BA-33.02/PBJ-DJA/2022 tanggal 8 Desember 2022. Adapun nilai selisih tersebut disetorkan ke Kas Negara pada Tahun Anggaran 2023.

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih-Piutang  
Bukan Pajak  
(Rp1.240.568)

#### C.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp1.240.568,00) dan (Rp32.688,00). Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- Sebesar Rp1.176.904,00 merupakan penyisihan atas sisa piutang kelebihan pembayaran sehubungan dengan hasil audit BPK RI atas Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Teknis dan Assessment serta Pembaharuan As Built Drawing Gedung Sutikno Slamet TA 2021 sebesar 0,5 % (kualitas lancar) dari Rp235.380.800,00.
- Sebesar Rp63.664,00 merupakan penyisihan atas piutang adanya selisih antara nilai jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan Realisasi Pembayaran Termin X Sewa Mesin Photocopy kebutuhan Direktorat Jenderal Anggaran yang disisihkan sebesar 0,5 % (kualitas lancar) dari Rp12.732.841,00.

Persediaan  
Rp438.525.956

#### C.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp438.525.956,00 dan Rp432.834.587,00. Hal ini menunjukkan kenaikan nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.691.369,00 atau 1,3% dibandingkan tahun 2021.

*Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Alat Tulis Kantor	81.311.261	66.168.312
2	Kertas dan Cover	68.215.346	93.689.222
3	Bahan Cetak	-	-
4	Bahan Komputer	278.527.699	265.715.733
5	Perabot Kantor	6.213.545	4.389.220
6	Alat Listrik	758.105	1.662.100
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.500.000	1.210.000
	<b>Jumlah</b>	<b>438.525.956</b>	<b>432.834.587</b>

Tanah  
Rp19.900.206.000

#### C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Anggaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.900.206.000 dan Rp19.900.206.000.

Tanah pada Direktorat Jenderal Anggaran merupakan tanah dari Rumah Jabatan yang berada di Pondok Indah.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp99.927.654.075

#### C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp99.927.654.075,00.

Terdapat kenaikan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.183.783.979,00 atau 2,2 persen dibandingkan tahun 2021.

##### *Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022*

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>97.743.870.096</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>4.393.988.052</b>
-Pembelian	311.305.700
-Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	68.382.850
-Reklasifikasi Masuk	147.400.000
-Transfer Masuk	3.866.899.502
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(2.210.204.073)</b>
-Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.210.204.073)
-Reklasifikasi Keluar	-
-Transfer Keluar	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>99.927.654.075</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(78.093.275.358)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>21.834.378.717</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.548.135.276

#### C.6. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp7.548.135.276,00 dan Rp7.328.831.899,00.

Nilai Gedung dan Bangunan pada Direktorat Jenderal Anggaran berupa Aset Rumah Jabatan yang berada di Pondok Indah dan berupa 9 unit apartemen yang diterima dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai Berita Acara penyerahan nomor BAST-43/SJ.8/2018 pada tanggal 26 Juli 2018. *Apartment* tersebut merupakan Bagunan Rumah Dinas Jabatan eselon II.

*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022*

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>7.328.831.899</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>219.303.377</b>
-Pengembangan Dengan KDP	219.303.377
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>-</b>
-Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>7.548.135.276</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(969.809.012)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>6.578.326.264</b>

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp617.669.237

**C.7. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi Dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp617.669.237,00 dan Rp687.693.228,00. Rincian Aset Tetap Lainnya pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

*Daftar Aset Tetap Lainnya Monografi per 31 Desember 2022*

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Monografi	584.390.987
2.	Peta (Map)	276.250
3.	Atlas	629.000
4.	Lukisan	32.373.000
<b>Jumlah</b>		<b>617.669.237</b>

*Rincian Mutasi Monografi per 31 Desember 2022*

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>687.693.228</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>28.800.000</b>
- Transfer Masuk	28.800.000
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>(98.823.991)</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	(98.823.991)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>617.669.237</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Rp2.475.881.962

### C.8. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp2.475.881.962,00 dan Rp2.861.262.762,00.

Nilai KDP sebesar Rp2.475.881.962,00 tersebut merupakan Biaya Proses Peremajaan Building Automation System (BAS) pada Gedung Sutikno Slamet yang terdiri dari kegiatan biaya Assessment Gedung, Perencanaan Konstruksi, Manajemen Konstruksi dan biaya Pengelola Kegiatan berupa FGD Persiapan Pelaksanaan MK, Assessment BAS dan Kelembagaan PPTK yang dilaksanakan pada tahun 2021. Kegiatan *Refocusing/Automatic Adjustment* menyebabkan anggaran yang telah disediakan untuk Peremajaan BAS dihapuskan sehingga tidak dapat dilaksanakan pada TA berjalan, dan akan dilanjutkan di TA berikutnya (TA 2023).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Rp79.063.084.370

### C.9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp79.063.084.370,00 dan Rp70.281.349.532,00, atau terdapat kenaikan sebesar 12,50 persen. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2022*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	99.927.654.075	(78.093.275.358)	21.834.378.717
2	Gedung dan Bangunan	7.548.135.276	(969.809.012)	6.578.326.264
3	Aset Tetap Lainnya	617.669.237	0	617.669.237
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>108.093.458.588</b>	<b>(79.063.084.370)</b>	<b>29.030.374.218</b>

Piutang TP/TGR  
Rp2.661.026.866

### C.10. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang

diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.661.026.866,00. dan Rp2.437.357.653,00.

*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Tuntutan Ganti Rugi a.n. Dedi Sadagori	2.636.026.866	2.412.357.653
Tuntutan Ganti Rugi a.n. Aditya Priyadi	25.000.000	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.661.026.866</b>	<b>2.437.357.653</b>

Kenaikan nilai piutang tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 disebabkan oleh perubahan nilai kurs. Tuntutan Ganti Rugi a.n Dedi Sadagori senilai USD169.062,78 dengan nilai kurs JISDOR BI per tanggal 30 Desember 2022 (tanggal 31 Desember 2022 merupakan hari libur) sebesar Rp15.592,00.

Tuntutan Ganti Rugi a.n Aditya Priyadi dan Dedi Sadagori telah diterima pengurusannya oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Tim PUPN) dengan nomor Surat SP3N-102/PUPNC.10.05/2016 tanggal 11 November 2016 dan SP3N-129/PUPNC.10.05/2017 tanggal 5 September 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengurusan Piutang Negara dimaksud beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta V.

Pada tanggal 11 April 2023, telah dilakukan konfirmasi kepada Kepala Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta dengan surat nomor S-66/AG.1/2023 mengenai perkembangan penyelesaian piutang kerugian negara di DJA yang telah dilimpahkan ke Tim PUPN. Namun, hingga saat ini belum didapatkan informasi perkembangan atas piutang dimaksud.

*Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih - TP/TGR  
Rp2.661.026.866*

**C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.661.026.866,00 dan Rp2.437.357.653,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan

Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang  
Per 31 Desember 2022*

No.	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
1.	Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR atas Tuntutan Ganti Rugi a.n. Dedi Sadagori	Macet	2.636.026.866	2.636.026.866
2.	Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan TP/TGR atas Tuntutan Ganti Rugi a.n. Aditya Priyadi	Macet	25.000.000	25.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.661.026.866</b>	<b>2.661.026.866</b>

Piutang jangka panjang terdiri dari piutang TGR a.n Dedi Sadagori dan Aditya Priyadi yang memiliki kualitas piutang macet sehingga disisihkan 100%.

*Aset Tak Berwujud  
Rp10.151.118.218*

**C.12. Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp10.151.118.218,00 dan Rp 12.562.647.951,00.

Adapun mutasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022*

<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>12.562.647.951</b>
Pembelian Software	-
Transfer Keluar	(295.427.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(2.116.102.733)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>10.151.118.218</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(8.443.853.850)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.707.264.368</b>

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud. Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Anggaran berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

*Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp0*

#### **C.14. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari kewajiban masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp6.058.988,00

*Ekuitas  
Rp53.799.125.577*

#### **C.15. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp53.799.125.577,00 dan Rp62.053.989.399,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian Lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.528.726,00 dan Rp48.707.382,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 pendapatan yang menjadi komponen pendapatan-LO pada Laporan Operasional Ditjen Anggaran sebesar Rp8.528.726,00 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yakni:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp3.050.000 merupakan pendapatan penjualan barang non arsip berupa majalah dan berupa cetakan berlebih, buku dan map bekas, dan cover DIPA tahun-tahun yang lalu.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp4.514.476,00 berasal dari pendapatan sewa rumah Dinas Pegawai.
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp964.250,00 yang terdiri dari:
  - a. Rp335.000,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan *Technical Assistance On Monev Of Performance Implementation Of PPP AP Termin II* ke rekanan dengan berita acara serah terima nomor BA-08.03/PBJ-DJA/2022 dan SP2D nomor 221401302000744;
  - b. Rp263.940,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pencetakan Cover DIPA TA 2023 dengan berita acara serah terima nomor BA-12.02/AG.4/PPBJ.5/2022 dan SP2D nomor 220191302045199;
  - c. Rp365.310,00 merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pencetakan SP DIPA TA 2023 dengan berita acara serah terima nomor BA-12.01/AG.4/PPBJ.5/2022 dan SP2D nomor 220191301052230.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	3.050.000	3.500.000	(12,86)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	964.250	42.261.570	(97,72)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.514.476	2.945.812	53,25
<b>Jumlah</b>	<b>8.528.726</b>	<b>48.707.382</b>	<b>(82,49)</b>

*Beban Pegawai*  
Rp35.506.530.838

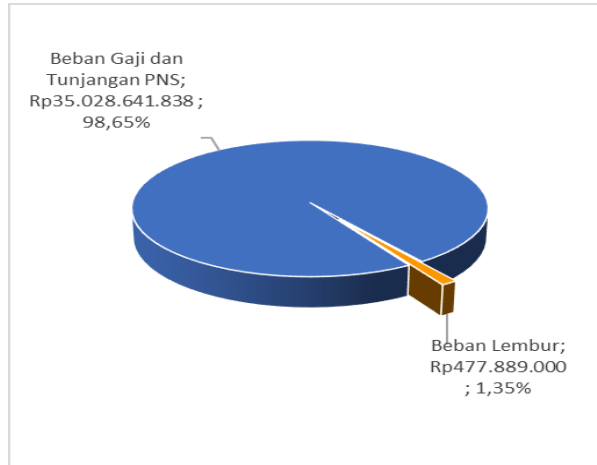
## D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp35.506.530.838,00 dan Rp63.604.193.812,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum bersatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	35.028.641.838	63.061.845.812	-44,45
Beban Lembur	477.889.000	542.348.000	(11,89)
<b>Jumlah</b>	<b>35.506.530.838</b>	<b>63.604.193.812</b>	<b>(44,18)</b>

Komposisi Beban Pegawai TA 2022 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



*Beban Persediaan*  
Rp281.818.833

### D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp281.818.833,00 dan Rp673.286.783,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Beban Persediaan Konsumsi	281.818.833	673.286.783	(58,14)
<b>Jumlah</b>	<b>281.818.833</b>	<b>673.286.783</b>	<b>(58,14)</b>

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp19.820.690.248

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.820.690.248,00 dan Rp31.257.862.142,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Beban Operasional	10.679.157.038	12.271.848.061	-12,98
Beban Non Operasional	4.218.399.521	5.668.099.471	(25,58)
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.343.422.037	594.134.745	126,11
Beban Sewa	1.049.789.659	1.547.082.193	(32,14)
Beban Jasa Profesi	786.662.500	1.165.836.551	(32,52)
Beban Jasa Lainnya	1.396.755.940	9.019.215.015	-84,51
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	346.503.553	991.646.106	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.820.690.248</b>	<b>31.257.862.142</b>	<b>(36,59)</b>

Beban Barang dan Jasa peruntukan untuk penanganan pandemi Covid-19, terlihat sebagai berikut:

*Beban Penanganan Pandemi Covid-19*

No.	Beban	Jumlah	Keterangan
1.	Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	3.164.780.912	Perlengkapan kebersihan ( <i>Hand Sanitizer</i> , sabun cuci tangan, cairan disinfektan) dan Penambah Daya Tahan tubuh
2	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	336.702.553	Jasa Penyemprotan Disinfektan, <i>Rapid</i> dan <i>Swab Test</i> Pegawai

*Beban Pemeliharaan*  
Rp4.586.874.959

**D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.586.874.959,00 dan Rp3.333.474.651,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	579.922.878	682.514.931	(15,03)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.107.917.085	1.373.197.165	(19,32)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	227.298.461	48.297.131	370,63
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.595.798.100	1.139.250.000	127,85
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	75.938.435	90.215.424	(15,83)
<b>Jumlah</b>	<b>4.586.874.959</b>	<b>3.333.474.651</b>	<b>37,60</b>

*Beban Perjalanan Dinas*  
Rp11.494.687.672

**D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban tersebut merupakan beban (*neto*) yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.494.687.672,00 dan Rp9.052.140.980,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Beban Perjalanan Biasa	2.676.218.339	1.279.782.145	109,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	251.283.000	183.122.000	37,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.649.748.000	3.796.160.000	(3,86)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.815.355.633	3.793.076.835	26,95
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	102.082.700	-	100
<b>Jumlah</b>	<b>11.494.687.672</b>	<b>9.052.140.980</b>	<b>26,98</b>

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih*  
Rp224.877.093

**D.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp224.877.093,00 dan Rp32.688,00, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	224.877.093,00	32.688,00

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp11.685.083.731*

#### **D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp11.685.083.731,00 dan Rp12.613.020.992,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.011.883.808	10.524.849.686	-4,87
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	181.071.331	171.595.677	5,52
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>10.192.955.139</b>	<b>10.696.445.363</b>	<b>-4,71</b>
Beban Amortisasi Software	1.492.128.592	1.916.575.629	-22,15
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi pemerintah	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>1.492.128.592</b>	<b>1.916.575.629</b>	<b>-22,15</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>11.685.083.731</b>	<b>12.613.020.992</b>	<b>-7,36</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp168.581.358*

#### **D.9. Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**

Nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp168.581.358,00) dan Rp1.562.772.994,00 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan

tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

Uraian Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2022	31 Desember 2021	% (naik/turun)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.000.000	0	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.700.000	1.557.817.683	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	29.035.500	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	636	4.955.311	(99,99)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	247.168.939	104.479.108	136,57
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(98.823.991)	-	100,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	(23.499.726)	(104.479.108)	(77,51)
<b>Jumlah</b>	<b>168.581.358</b>	<b>1.562.772.994</b>	<b>(827,01)</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp62.053.989.399*

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 62.053.989.399,00 dan Rp64.159.823.873,00.

*Surplus (Defisit) LO  
(Rp83.423.453.290)*

### **E.2. Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83.423.453.290,00 dan Rp118.922.531.672,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai  
Aset  
Rp0*

#### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0*

#### **E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021.

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap  
Rp0*

#### **E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp0*

#### **E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp177.825,00

*Koreksi Lain-lain  
Rp0*

#### **E.3.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik

Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Tidak terdapat Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

*Transaksi Antar Entitas*  
Rp75.168.589.468

#### **E.4. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp75.168.589.468,00 dan Rp116.816.875.023,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

##### *Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember 2022*

<b>Uraian Transaksi</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Diterima dari Entitas Lain	(208.802.437)
Ditagihkan ke Entitas Lain	74.125.972.129
Transfer Masuk	3.380.639.180
Transfer Keluar	(2.129.219.404)
Pengesahan Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>75.168.589.468</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### **E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) dan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp208.802.437,00 sedangkan DKEL sebesar Rp74.125.972.129,00.

#### **E.4.2. Transfer Masuk dan Transfer Keluar**

Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi pengalihan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) antar entitas guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi. Sampai dengan 31 Desember 2022 DJA terdapat Transfer Masuk pengalihan penggunaan BMN berupa 234 unit Peralatan dan Mesin (laptop) dari Sekretariat Jenderal sesuai dengan Berita

Acara Nomor: BAST-29.2/SJ.8/2022 tanggal 13 April 2022 dan berupa 354 unit Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Penggunaan BMN Nomor BA-9847/2/PLK.07/X.2022 tanggal 7 Oktober 2022. Sedangkan untuk Transfer Keluar berupa pengalihan penggunaan Barang Milik Negara kepada Sekretariat Jenderal yaitu 9 unit peralatan dan mesin (Telepon Satelit dan IP Phone) serta Aset Tak Berwujud (Software Komputer) sesuai dengan Berita Acara Nomor: BA-1/AG.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 dan berupa 2 unit Aset Tetap Renovasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Renovasi lantai 12 dan 15 Gedung Sutikno Slamet dalam rangka Implementasi ABW TA 2022 Nomor BA-54/AG.1/2022 tanggal 31 Desember 2022.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp53.799.125.577*

#### **E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp53.799.125.577,00 dan Rp62.053.989.399,00.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain yang mempengaruhi transaksi keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Jakarta, 2023  
Direktur Jenderal Anggaran



Ditandatangani secara elektronik  
Isa Rachmatarwata